

## DINAMIKA KETERLIBATAN BERBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN DI PULAU REMPANG SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

Alyssa<sup>1</sup>, Indra<sup>2</sup>, Laqisyah<sup>3</sup>, Satria<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Alyssa Zalfanda Rinaldi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

<sup>2</sup>Indra Alfalin (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

<sup>3</sup>Laqisyah Phillianova (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

<sup>4</sup>Satria Andrean Saputra (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

Alamat Korespondensi: [alyssazlfar@gmail.com](mailto:alyssazlfar@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This study analyzes the dynamics of various interest groups' involvement in the conflict surrounding the development of Rempang Eco-City as a National Strategic Project (PSN) on Rempang Island, Batam. The research adopts a comparative study approach and applies a political economy perspective to investigate the roles of government, local communities, and investors in shaping the conflict, particularly regarding land acquisition and social rights. The main focus is on the tensions between pro-growth coalitions (comprising government and private investors) and anti-growth coalitions (including local communities and environmental groups), alongside the role of mass media in influencing public perceptions and shaping policy decisions. This study aims to provide insights into the dynamics of agrarian conflicts and infrastructure development in Indonesia, and offers policy recommendations for resolving similar conflicts in the future, emphasizing the need for inclusive decision-making, sustainable urban planning, and improved transparency in the management of national strategic projects.*

**Keywords:** development conflict, interest groups, mass media, political economy, Rempang Eco-City

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika keterlibatan berbagai kelompok kepentingan dalam konflik yang muncul akibat pembangunan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang, Batam. Dengan menggunakan pendekatan studi komparatif dan perspektif ekonomi politik, penelitian ini mengkaji peran pemerintah, masyarakat lokal, dan investor dalam mempengaruhi konflik terkait pengadaan lahan dan hak-hak sosial. Fokus utama penelitian ini adalah ketegangan antara koalisi pro-pertumbuhan yang terdiri dari pemerintah dan investor, dan koalisi anti-pertumbuhan yang melibatkan masyarakat lokal serta aktivis lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang proyek ini dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika konflik agraria dan pembangunan infrastruktur, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik serupa di masa depan, dengan penekanan pada pendekatan pembangunan yang inklusif, keadilan sosial, dan transparansi.

**Kata Kunci:** ekonomi politik, kelompok kepentingan, konflik pembangunan, media massa, Rempang Eco-City

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur adalah elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di kawasan perkotaan. Namun, proses pembangunan sering kali dihadapkan pada konflik, terutama terkait pembebasan lahan, yang menjadi isu sensitif antara pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, konflik semacam ini sering muncul bersamaan dengan pesatnya urbanisasi, khususnya di kawasan pinggiran kota yang beralih fungsi dari daerah pedesaan menjadi wilayah urban (Walangare & Bahri, 2023). Salah satu contoh terbaru adalah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, yang menjadi sorotan nasional sejak dimulainya proyek pembangunan Rempang Eco-City pada tahun 2023. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mengubah Pulau Rempang menjadi kawasan industri dan destinasi wisata yang terintegrasi dengan investasi besar senilai Rp 381 triliun (Furqon et al., 2024).

Program Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PSN ini pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 dan telah disempurnakan melalui beberapa peraturan, termasuk Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 56 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. PSN mencakup berbagai sektor, seperti transportasi, energi, dan kawasan industri, dengan prioritas pada percepatan perizinan, penyediaan lahan, dan dukungan pendanaan. Namun, implementasi PSN sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti konflik pengadaaan lahan, kesesuaian tata ruang, dan perlindungan hak atas tanah masyarakat. Di Pulau Rempang, proyek Rempang Eco-City menimbulkan konflik agraria karena masyarakat dari 16 kampung tua harus direlokasi tanpa kejelasan tentang hak atas tanah mereka (Suparjo, 2018).

Pada Agustus 2023, Pulau Rempang ditetapkan sebagai PSN, yang mempercepat rencana pengembangan kawasan tersebut. Namun, status PSN ini juga memunculkan berbagai konflik antara pemerintah, masyarakat setempat, dan pihak swasta. Proyek Rempang Eco-City, yang melibatkan PT Makmur Elok Graha (MEG) bersama BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, berencana mengembangkan kawasan seluas 17.000 hektar dengan fokus pada industri kaca dan panel surya (Walangare & Bahri, 2023). Proyek ini memicu keresahan di kalangan warga Pulau Rempang yang harus direlokasi dari 16 kampung tua tempat mereka tinggal selama puluhan tahun, tanpa adanya kepastian status tanah yang jelas (Furqon et al., 2024).

Konflik ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks pertentangan kepentingan antara kelompok pro-growth dan anti-growth. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis konflik ini adalah melalui *growth machine theory*, yang menjelaskan bagaimana kelompok pro-growth coalition, yang terdiri dari pemerintah dan investor,

bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi melalui akumulasi lahan dan investasi (Walangare & Bahri, 2023). Di sisi lain, kelompok anti-growth coalition, yang melibatkan masyarakat setempat, menilai bahwa nilai guna lahan jauh lebih penting bagi mereka daripada nilai tukar ekonomi yang ditawarkan oleh proyek pembangunan. Ketimpangan ini memperburuk ketegangan antara kedua pihak, yang menjadi pemicu utama terjadinya konflik.

Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika keterlibatan berbagai kelompok kepentingan dalam konflik pembangunan Pulau Rempang sebagai PSN. Dengan menggunakan kerangka teori growth machine, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kontestasi kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat setempat membentuk dinamika konflik ini. Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan memperhatikan bagaimana media massa dan komunikasi publik mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konflik ini, yang pada akhirnya berdampak pada proses pengambilan kebijakan (Furqon et al., 2024). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik agraria dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam menyelesaikan konflik serupa di masa depan.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Dampak Sosial Ekonomi dari Proyek Pembangunan Nasional**

Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga membawa dampak sosial ekonomi signifikan. Salah satu dampaknya adalah penggusuran masyarakat dari lahan mereka, yang mengubah akses terhadap sumber daya alam dan fasilitas sosial. Menurut Cernea (1997), penggusuran ini merusak pola hidup dan jaringan sosial, menyebabkan stres, masalah kesehatan mental, serta menurunnya kepercayaan diri masyarakat.

Dampak PSN bervariasi. Contohnya, pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa meningkatkan pendapatan pekerja konstruksi tetapi merugikan petani yang kehilangan lahan, memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Di pesisir, proyek PSN merusak ekosistem laut, menurunkan hasil tangkapan ikan, dan memaksa masyarakat berganti pekerjaan, yang memperburuk kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, proyek seperti PLTU menurunkan produktivitas pertanian dan kualitas udara, berdampak negatif pada hasil panen dan kesehatan masyarakat.

Untuk memitigasi dampak negatif PSN, diperlukan pendekatan inklusif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, transparansi, kompensasi berkelanjutan, dan upaya berbasis komunitas. Hal ini memastikan PSN mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem sosial dan lingkungan.

## 2. Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Opini terhadap Proyek Negara

Media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat, dengan 167 juta pengguna di Indonesia pada 2023, di mana 79,5% berusia di atas 18 tahun (GoodStats, 2023). Platform ini sering digunakan untuk menyebarkan isu politik, seperti proyek strategis nasional, yang menjadi perhatian luas publik. Kelompok kepentingan memanfaatkan media sosial, termasuk buzzer, untuk mengarahkan opini publik demi mencapai tujuan mereka. Menurut Kurniawati (2023), buzzer adalah individu atau kelompok yang mempromosikan narasi politik melalui media sosial, memperkuat framing yang mendukung kelompok tertentu.

Dalam kasus Pulau Rempang, narasi bohong tersebar di media sosial, seperti isu warga harus membayar selisih harga rumah dalam relokasi dan video polisi membawa parang, yang kemudian dibantah pihak berwenang. Narasi ini menunjukkan adanya kepentingan tertentu di balik penyebaran informasi palsu. Selain itu, buzzer sering dipekerjakan dalam industri kampanye politik untuk memperluas informasi melalui retweet, tagar, dan strategi lainnya, menjadikan isu trending (Anugerah, 2024).

Fenomena ini mengkhawatirkan karena media sosial yang seharusnya menjadi ruang inklusif untuk bertukar informasi malah digunakan untuk memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, diperlukan perhatian terhadap penggunaan media sosial oleh kelompok kepentingan dalam memengaruhi persepsi masyarakat, terutama terkait proyek pemerintah.

## 3. *Political Lobbying* dalam Aktivitas Kelompok Kepentingan

Strategi lobbying kelompok kepentingan berbeda tergantung jenisnya. Kelompok asosiasi bisnis cenderung menggunakan inside lobbying (melobi langsung pengambil kebijakan), sementara kelompok masyarakat sipil memilih outside lobbying (menekan melalui opini dan aksi publik) (Dür & Mateo, 2023). Dalam isu kontroversial, asosiasi bisnis lebih fokus pada pendekatan langsung, sementara masyarakat sipil meningkatkan kampanye publik untuk membawa isu ke perhatian luas.

## 4. *Political Lobbying* dalam Aktivitas Kelompok Kepentingan

Strategi lobbying kelompok kepentingan berbeda tergantung jenisnya. Kelompok asosiasi bisnis cenderung menggunakan inside lobbying (melobi langsung pengambil kebijakan), sementara kelompok masyarakat sipil memilih outside lobbying (menekan melalui opini dan aksi publik) (Dür & Mateo, 2023). Dalam isu kontroversial, asosiasi bisnis lebih fokus pada pendekatan langsung, sementara masyarakat sipil meningkatkan kampanye publik untuk membawa isu ke perhatian luas.

### 5. *Political Lobbying* dalam Aktivitas Kelompok Kepentingan

Strategi lobbying kelompok kepentingan berbeda tergantung jenisnya. Kelompok asosiasi bisnis cenderung menggunakan inside lobbying (melobi langsung pengambil kebijakan), sementara kelompok masyarakat sipil memilih outside lobbying (menekan melalui opini dan aksi publik) (Dür & Mateo, 2023). Dalam isu kontroversial, asosiasi bisnis lebih fokus pada pendekatan langsung, sementara masyarakat sipil meningkatkan kampanye publik untuk membawa isu ke perhatian luas.

Contohnya, dalam pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja 2020, asosiasi bisnis seperti KADIN menggunakan inside lobbying untuk mendorong pengesahan dengan argumen manfaat ekonomi. Sebaliknya, masyarakat sipil melalui LSM melakukan protes publik dan kampanye media sosial untuk menyoroiti dampak negatif undang-undang tersebut. Hal serupa terlihat dalam isu pertambangan, di mana bisnis melobi regulasi yang menguntungkan mereka, sementara komunitas terdampak melakukan advokasi dan protes melindungi hak serta lingkungan.

Lobbying menjadi bagian penting demokrasi modern, tetapi tantangan muncul terkait kesetaraan pengaruh. Kelompok bisnis sering memiliki akses dan sumber daya lebih besar, menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan kebijakan. Kasus seperti revisi UU Cipta Kerja menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan suara semua pihak, terutama kelompok terpinggirkan, didengar. Dengan pendekatan pluralistik dan transparan, sistem politik dapat lebih akomodatif terhadap beragam kepentingan, memperkuat demokrasi.

### **METODE**

Pembangunan infrastruktur adalah elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di kawasan perkotaan. Namun, proses pembangunan sering kali dihadapkan pada konflik, terutama terkait pembebasan lahan, yang menjadi isu sensitif antara pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, konflik semacam ini sering muncul bersamaan dengan pesatnya urbanisasi, khususnya di kawasan pinggiran kota yang beralih fungsi dari daerah pedesaan menjadi wilayah urban (Walangare & Bahri, 2023). Salah satu contoh terbaru adalah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, yang menjadi sorotan nasional sejak dimulainya proyek pembangunan Rempang Eco-City pada tahun 2023. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mengubah Pulau Rempang menjadi kawasan industri dan destinasi wisata yang terintegrasi dengan investasi besar senilai Rp 381 triliun (Furqon et al., 2024).

Program Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif

pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PSN ini pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 dan telah disempurnakan melalui beberapa peraturan, termasuk Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 56 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. PSN mencakup berbagai sektor, seperti transportasi, energi, dan kawasan industri, dengan prioritas pada percepatan perizinan, penyediaan lahan, dan dukungan pendanaan. Namun, implementasi PSN sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti konflik pengadaan lahan, kesesuaian tata ruang, dan perlindungan hak atas tanah masyarakat. Di Pulau Rempang, proyek Rempang Eco-City menimbulkan konflik agraria karena masyarakat dari 16 kampung tua harus direlokasi tanpa kejelasan tentang hak atas tanah mereka (Suparjo, 2018).

Pada Agustus 2023, Pulau Rempang ditetapkan sebagai PSN, yang mempercepat rencana pengembangan kawasan tersebut. Namun, status PSN ini juga memunculkan berbagai konflik antara pemerintah, masyarakat setempat, dan pihak swasta. Proyek Rempang Eco-City, yang melibatkan PT Makmur Elok Graha (MEG) bersama BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, berencana mengembangkan kawasan seluas 17.000 hektar dengan fokus pada industri kaca dan panel surya (Walangare & Bahri, 2023). Proyek ini memicu keresahan di kalangan warga Pulau Rempang yang harus direlokasi dari 16 kampung tua tempat mereka tinggal selama puluhan tahun, tanpa adanya kepastian status tanah yang jelas (Furqon et al., 2024).

Konflik ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks pertentangan kepentingan antara kelompok pro-growth dan anti-growth. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis konflik ini adalah melalui growth machine theory, yang menjelaskan bagaimana kelompok pro-growth coalition, yang terdiri dari pemerintah dan investor, bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi melalui akumulasi lahan dan investasi (Walangare & Bahri, 2023). Di sisi lain, kelompok anti-growth coalition, yang melibatkan masyarakat setempat, menilai bahwa nilai guna lahan jauh lebih penting bagi mereka daripada nilai tukar ekonomi yang ditawarkan oleh proyek pembangunan. Ketimpangan ini memperburuk ketegangan antara kedua pihak, yang menjadi pemicu utama terjadinya konflik.

Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika keterlibatan berbagai kelompok kepentingan dalam konflik pembangunan Pulau Rempang sebagai PSN. Dengan menggunakan kerangka teori growth machine,

penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kontestasi kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat setempat membentuk dinamika konflik ini. Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan memperhatikan bagaimana media massa dan komunikasi publik mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konflik ini, yang pada akhirnya berdampak pada proses pengambilan kebijakan (Furqon et al., 2024). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik agraria dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam menyelesaikan konflik serupa di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PEMBAHASAN

Peran kelompok kepentingan dalam konflik ini sangatlah kompleks, karena ada ketegangan antara aktor-aktor yang memiliki tujuan ekonomi jangka panjang dengan kelompok masyarakat yang lebih fokus pada hak sosial dan keberlanjutan hidup mereka. Selain itu, jurnal Evendi (2024) juga mencatat pentingnya peran media massa dalam memperbesar ketegangan antara kelompok-kelompok ini. Pemberitaan yang lebih berpihak pada satu pihak tertentu sering kali memperburuk persepsi publik terhadap pihak lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah. Masyarakat, yang terinformasi melalui media, cenderung lebih memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks perjuangan melawan ketidakadilan sosial, sementara pihak pemerintah dan perusahaan sering kali lebih fokus pada narasi pembangunan dan peningkatan ekonomi.

*Pro-growth* adalah kelompok yang mendukung pembangunan ekonomi melalui urbanisasi, industrialisasi, dan proyek infrastruktur besar dengan fokus pada peningkatan investasi serta daya saing wilayah. Kelompok ini dapat didefinisikan sebagai *growth booster* karena orientasinya pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, *anti-growth* adalah kelompok yang memperjuangkan perlindungan komunitas lokal, pelestarian warisan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Dimana kelompok *anti-growth* dapat dikenal sebagai *community defenders*. Kelompok yang berkepentingan *growth booster*, yang biasanya terdiri atas pemerintah, investor, dan korporasi, sering kali berhadapan dengan *community defenders*, yang melibatkan masyarakat setempat, aktivis sosial, dan pegiat lingkungan. Konflik antara keduanya mencerminkan pertarungan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan nilai sosial-ekologis jangka panjang.

Konflik pembangunan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi pusat konflik antara dua kelompok tersebut, yaitu kelompok pemerintah dan investor pengembang sebagai kelompok *growth booster* (PT Makmur Elok Graha dan BP Batam) serta kelompok masyarakat yang diklasifikasikan sebagai kelompok *community defenders*. Kelompok pertama, yaitu kelompok *growth booster*, terdiri dari pemerintah dan investor pengembang berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi melalui akumulasi investasi dan penciptaan lapangan kerja yang berpotensi meningkatkan perekonomian regional. Kelompok ini mendukung proyek Rempang Eco-City sebagai bagian dari Program Strategis Nasional yang bertujuan mempercepat transformasi ekonomi di Batam (Furqon et al., 2024). Namun, *growth booster coalition* mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Mereka mengklaim bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi akan meresap ke seluruh lapisan masyarakat, meskipun kenyataannya tidak demikian. Kelompok *growth booster* di dalam proyek ini seringkali mengabaikan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan relokasi masyarakat, seperti hak atas tempat tinggal, pekerjaan, dan layanan sosial. Relokasi tanpa jaminan hak atas tanah yang jelas semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak swasta. Hal ini menciptakan ketegangan yang semakin memuncak, terutama dengan adanya laporan kekerasan yang terjadi selama proses penggusuran oleh aparat negara yang berupaya untuk menertibkan kawasan

Di lain sisi, terdapat kelompok *community defender*, kelompok masyarakat pulau rempang, yang terdiri dari komunitas nelayan dan petani. Mereka menolak adanya pembangunan serta keputusan relokasi paksa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Pulau Rempang tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan yang dijanjikan oleh kelompok *growth booster*, yang terdiri dari pemerintah dan elit bisnis. Selain itu, mereka merasa terancam oleh keputusan relokasi yang tidak diikuti dengan kepastian status tanah dan mekanisme ganti rugi yang jelas (Evedi, 2024).

Peran media juga dianggap berkontribusi pada eskalasi konflik. Narasi yang tidak seimbang kerap membuat hubungan antara pihak-pihak di atas semakin keruh tidak menemukan titik temu. Dalam beberapa kasus, pemberitaan kerap berpihak pada kelompok tertentu memperdalam rasa ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah dan investor.

Dampak yang ditimbulkan dari konflik ini sangat luas. Dari aspek sosial, proses relokasi yang tidak inklusif menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur sosial yang telah terbangun sejak lama menjadi rusak akibat hilangnya tempat tinggal masyarakat yang menjadi pusat dari komunitas. Dari aspek

ekonomi, hilangnya tanah berdampak pada hilangnya mata pencaharian warga, utamanya warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Mereka kehilangan akses ke sumber daya yang menjadi mata pencaharian mereka.

Konflik ini juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang Growth Machine Theory. Growth Booster Coalition merupakan kelompok berkuasa mengontrol pembangunan yang ada dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan profit dari proyek ini melalui industrialisasi dan investasi besar. Dalam konteks ini, tanah dilihat sebagai alat akumulasi kapital, bukan sebagai elemen sosial atau budaya. Sebaliknya, kelompok *community defender*, merupakan kelompok yang dikontrol oleh kelompok *growth booster*. Mereka melihat tanah sebagai fondasi kehidupan yang tidak dapat digantikan. Perbedaan posisi dan pandangan ini menciptakan ketegangan yang sulit untuk dihindari. Pendekatan pembangunan yang berpola *top-down* dan tidak inklusif juga semakin memperburuk situasi yang ada.

## DISKUSI

Studi ini menyoroti keberlanjutan konsolidasi kekuasaan berbasis elit dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, seperti pengembangan Rempang Eco-City, yang mencerminkan dinamika koalisi pertumbuhan sebagaimana terlihat dalam politik perkotaan global. Dalam kasus Rempang, kelompok *growth booster coalition* yang terdiri dari badan pemerintah, elit politik lokal, dan investor seperti PT MEG dan Xinyi Group menyelaraskan strategi mereka untuk melaksanakan proyek ini. Koalisi ini memprioritaskan kepentingan ekonomi dengan memproyeksikan pertumbuhan industri sebagai manfaat publik, namun sering mengabaikan kekhawatiran sosial-budaya dan lingkungan masyarakat lokal (Giovanni Walangare & Bahri, 2023). Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 memberikan legitimasi pada proyek ini melalui penyederhanaan perizinan dan insentif investasi, tetapi minimnya konsultasi publik memperburuk ketegangan sosial (Mulyono, 2021).

Di balik retorika pembangunan, kepentingan bisnis memainkan peran sentral dalam pengembangan Rempang Eco-City. Salah satu tujuan utama proyek ini adalah menarik investasi asing, seperti yang dilakukan oleh Xinyi Group, yang berencana membangun fasilitas manufaktur kaca dan solar panel di Rempang (DetikFinance, 2024). Investasi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan meningkatkan daya saing ekspor. Selain itu, lokasi strategis Rempang yang dekat dengan Singapura menjadikannya aset penting untuk mengintegrasikan kawasan ini dalam jaringan perdagangan internasional. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal untuk memikat investor, mencerminkan

prioritas ekonomi yang dominan dalam perencanaan proyek ini.

Pada tahap awal, konsolidasi elit melibatkan pemanfaatan otoritas politik dan insentif ekonomi untuk mengamankan akses lahan dan menekan oposisi. Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional pada tahun 2023 menjadi alat untuk mempercepat investasi, namun pendekatan top-down ini menghasilkan konflik terkait hak atas tanah dan identitas budaya masyarakat adat (Solidaritas Nasional untuk Rempang, 2023). Selain itu, perluasan kewenangan BP Batam melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992 menunjukkan tumpang tindih antara kepentingan administratif dan ekonomi yang sering mengesampingkan hak masyarakat adat (Purnomo, 2022).

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperkuat posisi investor dengan memberikan kemudahan perizinan dan perlindungan hukum, tetapi pada saat yang sama, proses pengadaan tanah dilakukan dengan cepat dan minim partisipasi masyarakat adat. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebenarnya mewajibkan konsultasi publik dalam perencanaan tata ruang, namun implementasinya sering kali hanya formalitas, memperparah perasaan marjinalisasi di kalangan masyarakat lokal (Mulyono, 2021).

Seperti yang digambarkan oleh Winters (2011), praktik oligarki lokal yang dilakukan oleh kelompok *growth booster* menggunakan jaringan politik dan pengaruh keuangan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Berbeda dengan dominasi oligarki di tingkat nasional yang menggunakan media dan partai politik, proyek Rempang lebih bergantung pada pemaksaan melalui kebijakan negara. Peran ganda aktor seperti Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Walikota Batam memperlihatkan kelemahan dalam transparansi tata kelola dan konflik kepentingan yang melekat dalam proyek ini (Giovanni Walangare & Bahri, 2023).

Sebaliknya, kelompok *community defenders* yang terdiri dari komunitas lokal dan kelompok masyarakat sipil memanfaatkan kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk menuntut pengakuan atas hak adat mereka. UUPA menekankan bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial, sehingga penggunaannya tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat, termasuk komunitas adat (Sutrisno & Wulandari, 2022). Organisasi seperti WALHI dan LBH Pekanbaru bersatu dengan komunitas adat untuk menolak proyek ini, dengan alasan degradasi lingkungan dan pengusuran budaya. Namun, keterbatasan dalam membangun platform politik terpadu membuat perlawanan ini rentan terhadap fragmentasi dan kooptasi (Solidaritas Nasional untuk Rempang, 2023; WALHI Riau, 2023).

Meskipun taktik koersif digunakan oleh kelompok *growth booster*, oposisi berhasil menunda beberapa aspek proyek, seperti batas waktu relokasi. Penundaan ini menunjukkan kerentanan konsolidasi elit ketika dihadapkan pada perlawanan lokal yang terorganisasi dengan baik. Ketidakpastian hukum atas status tanah, minimnya keterlibatan masyarakat dalam tata ruang, dan absennya transparansi dalam proses relokasi menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif untuk mencegah konflik berkepanjangan (Utami, 2023).

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pembangunan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) mencerminkan konflik kompleks antara koalisi pro-growth, yang terdiri dari pemerintah dan investor swasta, dengan koalisi *community defenders* yang melibatkan masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil. Konflik ini berakar dari masalah pembebasan lahan, hak sosial, dan pelestarian identitas budaya, yang menunjukkan tantangan besar dalam proses urbanisasi di Indonesia. Pendekatan *top-down* yang diambil oleh koalisi *growth booster* sering kali mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal, sementara ketidakpastian terkait status tanah dan mekanisme kompensasi memperburuk ketegangan, yang akhirnya memicu perasaan ketidakadilan di kalangan warga Pulau Rempang.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diterapkan. Pertama, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan secara inklusif dan transparan, termasuk konsultasi publik yang bermakna. Kedua, sistem pengakuan hak atas tanah dan mekanisme ganti rugi yang adil harus diterapkan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Ketiga, penilaian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif harus dilakukan untuk menghindari kerusakan ekologis dan sosial. Terakhir, memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan peran media untuk memberikan ruang bagi semua pihak dalam menyampaikan pandangan mereka, dapat membantu menciptakan proses pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afdhal, & Hidayat, R. (2019). Perlawanan Gerakan Guru Pasca Orde Baru di Indonesia: Studi Pada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 1-16.
- Ahmad, F. S. (2022). The Impact of Trans Java Toll Road Construction on Economic Growth in Central Java: IPB University. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 1-18. <https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.1-18>.
- Al Khanzah, R., Retnawati, R., Pradana, R. A., & Ihsan, M. I. (2024). Mahasiswa dan Intelektual sebagai Kekuatan Politik: Studi atas Gerakan Mahasiswa Terhadap Penolakan Kebijakan UU Ciptaker. *Journal Politique*, 4(1), 117-129. <https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.1.117-129>
- Anugerah, B. (2024). View of Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia. Lemhannas.go.id. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/340/220>
- Aziz, A. (2023). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Madani: Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 626-638. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>
- Britannica. (2019). Interest Group - Factors Shaping Interest Group Systems. In *Encyclopædia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/interest-group/Factors-shaping-interest-group-systems>
- Cernea, M. (1997). The risks and reconstruction model for resettling displaced populations. *World Development*, 25(10), 1569-1587.
- Dür, A., & Mateo, G. (2023). Lobbying in the face of politicisation: interest group strategies in trade policy. *Journal of European Public Policy*, 31(1), 1-27. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2203161>
- Elvira Valentine, Marchell Nabil Muhamad, & Mochamad Ikhsan Nur Hakim. (2023). *Konflik Pulau Rempang dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(1), 1-25.
- Evendi, R. H. (2024). Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah. *UNES Law Review*, 6(4), 10944-10954.
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City*

- Planning*, 31(2), 97-121.  
<https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Fasmalia, P., & Angela, D. (2024). Walhi's strategy to fight for justice in environmental permit cancellation: Case study of construction of PLTU Tanjung Jati A Cirebon. *Journal La Sociale*, 5(4), 936-950. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i4.1219>
- Fuzain, N. A. (2023, November 11). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *urnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081~1088.
- Gianie. (2023, September 18). *Rempang, Proyek Strategis Nasional, dan Luka Sosial*. Kompas.id; Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/rempang-proyek-strategis-nasional-dan-luka-sosial>
- Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing Theories of American politics: Elites, Interest groups, and Average Citizens. *Perspectives on Politics*, 12(03), 564-581.  
<https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/testing-theories-of-american-politics-elites-interest-groups-and-average-citizens/62327F513959D0A304D4893B382B992B>
- GoodStats. (2023, June 21). Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia 2017-2026. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAlp>
- Hamid, Edy Suandi. (2017). *Disruptive Innovation: Manfaat dan Kekurangan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi*. Seminar Nasional Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, Indonesia.
- Havasy, C. (2022). Interest Group Lobbying and Political Equality. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4162073>
- Holyoke, T. T. (2022). Pluralism (the Interest Group Theory of Politics). Springer eBooks, 1000-1005. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-44556-0\\_95](https://doi.org/10.1007/978-3-030-44556-0_95)
- John, P. (1996). CENTRALIZATION, DECENTRALIZATION AND THE EUROPEAN UNION: THE DYNAMICS OF TRIADIC RELATIONSHIPS. *Public Administration*, 74(2), 293-313. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1996.tb00871.x>
- Jumaroh, S. (2024). *Gerakan protes Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau: Kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2014-2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Klüver, H. (2019). The survival of interest groups: evidence from Germany. *West European Politics*, 43(7), 1436-1454. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1662634>

- Kominfo. (2019). Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo.go.id. <https://www.kominfo.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-warga-pulau-rempang-terdampak-relokasi-diminta-bayar-selisih-harga-rumah>
- Kurnia, D., Patrianti, T., Syahputra, Y. R., Rifqi, M., & Bagas, M. A. (2024). Peran Humas Pemerintah Kota Batam Dalam Penanganan Kasus Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5254-5264.
- Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 260-275. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/2313/1755>
- McFarland, A. S. (1987). Interest Groups and Theories of Power in America. *British Journal of Political Science*, 17(2), 129-147. <https://doi.org/10.1017/s0007123400004683>
- Muhdany Yusuf Laksono. (2023, October 19). *Proyek Rempang Eco-City Jadi PSN, Payung Hukumnya Permenko Perekonomian Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com;Kompas.com. <https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/19/120000321/proyek-rempang-eco-city-jadi-psn-payung-hukumnya-permenko-perekonomian?page=all>
- Mulyono, T. (2021). "Public Consultation and Its Efficacy in Spatial Planning for National Projects". *Indonesian Journal of Urban Studies*, 5(2), 134-150.
- Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, & Novia Asiska Ramadani. (2023). *Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1047.
- Olson, M. (1986). A Theory of the Incentives Facing Political Organizations. *International Political Science Review*, 7(2), 165-189. <https://doi.org/10.1177/019251218600700205>
- Prasasti, E. S. (2017). *Partai Politik dan Koalisi: Perbedaan Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Sesama Pendukung Pemerintah SBY Periode 2009-2014*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Proyek Pengembangan Pulau Rempang Masuk Daftar Program Strategis Nasional. (2023, August 31). *BP Batam*. <https://bpbatam.go.id/proyek-pengembangan-pulau-rempang-masuk-daftar-program-strategis-nasional/>
- Purnomo, D. (2022). "Industrialization Policies and Indigenous Conflict: The BP Batam Case". *Journal of Maritime Development Studies*, 7(1), 45-68.
- Ridhwan, M., Fauzi, & Daud, S. (2015). *Transisi ekonomi politik GAM: Kajian arah pembangunan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*.

- Fikiran Masyarakat*, 3(1), 88-99.
- Saturi, S. (2023, December 12). *Derita Warga Lahat dalam Jerat Polusi PLTU Batubara*. Mongabay. Retrieved October 17, 2024, from <https://www.mongabay.co.id/2023/12/12/derita-warga-lahat-dalam-jerat-polusi-pltu-batubara/>
- Setiawan, K. (2024, September 16). *Peran Kadin di IKN dan Omnibus Law*. Tempo; KORAN.TEMPO.CO. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/489932/peran-kadin-di-ikn-dan-omnibus-law>
- Solidaritas Nasional untuk Rempang. (2023). *Keadilan timpang di Pulau Rempang: Temuan awal investigasi atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).
- Stange, G., & Patock, R. (2010). *From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(1), 95-120.
- Stephen Giovanni Walangare & Syaiful Bahri. (2023). *Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City*. Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 15(2), 381-387.
- Sumaryoto. (2010, Agustus). *Dampak Keberadaan Jalan Tol terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya*. *Journal of Rural and Development*, 1.
- Sutrisno, H., & Wulandari, M. (2022). "The Impact of Agrarian Law on Indigenous Land Rights in Indonesia". *Indonesian Journal of Agrarian Law*, 10(1), 101-120.
- Syofina Dwi Putri Aritonang & Ida Bagus Ayodya Maheswara. (2023). *Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum*. *IBLAM Law Review*, 3(3), 472-476.
- Tasya. (2023, September 25). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Tempo. (2024, March 13). *Riset: UU Cipta Kerja Gagal Sejahterakan Buruh*. Tempo; KORAN.TEMPO.CO. <https://koran.tempo.co/read/ilmu-dan-teknologi/487683/riset-uu-cipta-kerja-gagal-sejahterakan-buruh>
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). *Upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan bagi masyarakat Riau*. *Jurnal HAM*, 12(3), 367-384. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.367->

[384&#8203::contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](#)

- Walangare, S. G., & Bachri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 381-403.
- Widiasti, Q. (2023, September 24). *Pulau Rempang*. Dpr.go.id.  
<https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/121>
- Wiebke Marie Junk, & Rasmussen, A. (2023). Are citizens responsive to interest groups? A field experiment on lobbying and intended citizen behaviour. *West European Politics*, 1-27.  
<https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2229710>
- Wilson, F. L., Berger, S. D., Harrison, R. J., Lehmbruch, G., Schmitter, P. C., Lehmbruch, G., & Wilensky, H. L. (1983). Interest Groups and Politics in Western Europe: The Neo-Corporatist Approach. *Comparative Politics*, 16(1), 105.  
<https://doi.org/10.2307/421599>
- Winters, J. A. (2014). Oligarchy. *The Encyclopedia of Political Thought*, 2601-2606.  
<https://doi.org/10.1002/9781118474396.wbept0726>
- World Bank. (n.d.). *Indonesia Sustainable Oceans Program*.  
<https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-oceans-program/overview>